



Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Bantuan Ternak Di Kabupaten Banggai

Lia Devi Susanti¹, Sastro Mustapa Wantu², Roni Lukum³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : lia_s1pkn@mahasiswa.ung.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to evaluate local government policies in the planning and implementation of livestock assistance programs in Banggai Regency and to analyze their impact on farmers' welfare. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman.

The findings indicate that the livestock assistance policy is relatively effective and administratively efficient, with a fairly good level of appropriateness in aligning livestock types with local conditions. However, limitations remain in terms of adequacy, equity, and responsiveness, particularly regarding sustained assistance, unequal distribution, and reactive response mechanisms. The economic impact of the program is dualistic, generating short term income through broiler chickens while strengthening long-term economic assets through goats and cattle. Social impacts are reflected in increased interaction and participation among farmers, although these have not yet been strongly institutionalized. Meanwhile, the welfare impact remains fluctuating and not yet fully stable. In conclusion, the livestock assistance policy has not fully achieved sustainable welfare outcomes, thus requiring improvements in continuous assistance, market access, and community empowerment based on local needs.

Keywords: Policy evaluation, livestock assistance, farmers' welfare, community empowerment, policy implementation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan ternak di Kabupaten Banggai serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan peternak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program bantuan ternak tergolong cukup efektif dan efisien secara administratif serta memiliki tingkat ketepatan yang relatif baik dalam menyesuaikan jenis ternak dengan kondisi lokal. Namun, dari aspek kecukupan, pemerataan, dan responsivitas masih terdapat keterbatasan, terutama pada pendampingan berkelanjutan, distribusi yang belum merata, serta mekanisme respons yang masih bersifat reaktif. Dampak ekonomi program bersifat dualistik, yaitu meningkatkan pendapatan jangka pendek pada ternak ayam super dan memperkuat aset ekonomi jangka panjang pada kambing dan sapi. Dampak sosial terlihat pada peningkatan interaksi dan partisipasi peternak, meskipun belum terlembagakan secara kuat. Sementara itu, dampak

kesejahteraan masih bersifat fluktuatif. Kesimpulannya, kebijakan bantuan ternak belum sepenuhnya mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan sehingga memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, akses pasar, dan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal.

Kata Kunci: *Evaluasi kebijakan, Bantuan Ternak, Kesejahteraan peternak, Pemberdayaan masyarakat, Implementasi kebijakan*

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor peternakan hingga saat ini dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperkuat kesejahteraan rumah tangga di wilayah pedesaan (Hasbiah & Hasdiansa, 2025). Sub sektor ini memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat, khususnya petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, peternakan rakyat tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi sosial berupa penguatan kapasitas individu, kelompok ternak, serta ketahanan sosial ekonomi keluarga (Zaenuddin, 2026). Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam subsektor peternakan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan (Nurhikma et al., 2026). Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan peternakan menekankan pada penguatan aset produktif, peningkatan keterampilan teknis, serta pengembangan kelembagaan peternak (Tumewu & Lainawa, 2025). Program bantuan ternak menjadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk memperluas kepemilikan aset produksi sekaligus meningkatkan kapasitas usaha peternak kecil. Secara konseptual, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan skala usaha, produktivitas, dan keberlanjutan usaha ternak (Mardiana et al., 2026). Namun, keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada kualitas perencanaan kebijakan, ketepatan desain program, serta kapasitas implementasi di tingkat lokal yang seringkali menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan institusional.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sektor peternakan (Nugroho, 2018). Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sosial, ekonomi (Maharaksa et al., 2025). Dengan demikian, program bantuan ternak seharusnya dirancang berdasarkan identifikasi masalah yang akurat, analisis kebutuhan kelompok sasaran yang komprehensif, serta tujuan kebijakan yang terukur. Kualitas perencanaan kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan (Indah et al., 2024). Keterbatasan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan seringkali memunculkan kesenjangan antara tujuan kebijakan (*policy objectives*) dan hasil kebijakan (*policy outcomes*) (Sinaga & Rotua, 2024). Kesenjangan ini mencerminkan adanya persoalan dalam proses implementasi kebijakan publik, baik yang bersumber dari faktor internal maupun

eksternal. Oleh Edward III (1980) Faktor-faktor seperti komunikasi kebijakan yang tidak efektif, disposisi pelaksana yang kurang optimal, serta struktur birokrasi yang belum mendukung menjadi variabel penting yang memengaruhi keberhasilan kebijakan (dalam Nunung et al., 2025). Selain itu, dinamika sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat juga turut memengaruhi capaian kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan ternak tidak dapat diukur hanya dari realisasi penyaluran bantuan, tetapi harus dilihat dari dampak nyata terhadap kesejahteraan peternak.

Permasalahan implementasi kebijakan bantuan di sektor peternakan juga tercermin dalam berbagai temuan penelitian yang menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima, rendahnya kapasitas pengelolaan bantuan, serta lemahnya pendampingan teknis bagi peternak (Wakim & Wibowo, 2025; Putri, 2025). Penekanan pada aspek administratif dibandingkan dengan aspek substantif menyebabkan program berjalan secara prosedural, namun belum mampu menghasilkan dampak penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kecenderungan kebijakan yang bersifat formalitas tanpa diikuti dengan efektivitas implementasi yang memadai.

Evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk menilai kinerja program bantuan ternak secara utuh. Dunn W. N (1999) Berpendapat evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap nilai dan manfaat kebijakan berdasarkan kriteria tertentu, seperti efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran (dalam Zakirin & Arifin, 2022). Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan kebijakan, efisiensi mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, sedangkan ketepatan sasaran menilai akurasi penerima manfaat sesuai dengan kriteria kebijakan (Rizti et al., 2025). Ketiga kriteria ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana program bantuan ternak mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketidakmampuan kebijakan dalam memenuhi ketiga kriteria tersebut berpotensi menimbulkan berbagai implikasi negatif, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, munculnya ketergantungan bantuan, serta tidak berkembangnya kapasitas usaha peternak secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal kebijakan berbasis pemberdayaan dengan realitas implementasi di lapangan. Idealnya, kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga harus mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata serta menghasilkan perubahan yang berkelanjutan (Ulfa & Frinaldi, 2025).

Kabupaten Banggai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan subsektor peternakan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan program bantuan ternak sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program yang dijalankan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi rumah tangga peternak, namun tanpa evaluasi kebijakan yang sistematis, sulit untuk memastikan sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, efektivitas pelaksanaan program, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima.

Kesenjangan antara harapan dan realitas dalam implementasi program bantuan ternak berpotensi menciptakan siklus kebijakan yang tidak efektif. Ketika program tidak mampu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat (Setyawan et al., 2025). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan di masa mendatang (Warman et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan ternak di Kabupaten Banggai dengan mengacu pada indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini juga menganalisis sejauh mana dampak program mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan peternak. Selain itu, kajian ini menelaah kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan guna memahami dinamika implementasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena implementasi kebijakan program bantuan ternak serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial, persepsi, dan pengalaman aktor kebijakan, baik dari pihak pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat (Sugiyono, 2011). Prosedur penelitian dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu perumusan masalah, kajian pustaka, penyusunan rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi hasil penelitian. Tahapan tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi penelitian, mengontrol kualitas data, serta menjamin validitas dan reliabilitas temuan (Arikunto, 2011). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai sebagai lokasi utama pengumpulan data, dengan fokus wilayah penelitian pada Kecamatan Moilong sebagai daerah penerima program bantuan ternak. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pengumpulan data di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bantuan ternak, yang mencakup aspek perencanaan, distribusi bantuan, pelatihan dan pendampingan teknis, faktor pendukung dan penghambat, mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui informan yang memiliki keterkaitan dengan program bantuan ternak, meliputi pejabat atau staf Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai serta masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Moilong. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan relevansi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam program. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan program, arsip pemerintah, buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan untuk mendukung dan memperkuat data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan serta pelaksanaan program bantuan ternak. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi, persepsi, dan pengalaman informan terkait implementasi kebijakan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen, laporan, dan arsip yang relevan dengan penelitian. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang utuh dan mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1992), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis sehingga menghasilkan temuan yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai

Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Ternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai memiliki karakteristik diferensial berdasarkan jenis ternak yang diberikan. Bantuan ayam super terbukti memberikan dampak ekonomi jangka pendek melalui peningkatan produksi dan penjualan yang relatif cepat, sehingga secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga peternak. Sebaliknya, bantuan kambing PE dan sapi bali lebih berfungsi sebagai aset produktif jangka menengah dan panjang, di mana manfaat ekonominya baru dapat dirasakan setelah terjadi reproduksi atau penjualan pada waktu tertentu. Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan aktivitas beternak, perubahan pola ekonomi keluarga menjadi lebih produktif, serta tumbuhnya optimisme peternak terhadap keberlanjutan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik biologis ternak dan pola usaha yang berbeda. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan telah berhasil menghasilkan output berupa distribusi bantuan dan peningkatan akses terhadap aset produktif, namun *outcome* berupa peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan belum sepenuhnya merata (Herlamban & Wicaksono, 2025) .

Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan konsep efektivitas menurut Dunn yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan kebijakan yang dirumuskan (Lejiu et al., 2014). Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai telah mencapai sebagian tujuan kebijakan, terutama dalam meningkatkan akses terhadap sumber penghidupan produktif, tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan kesejahteraan yang berkelanjutan pada seluruh kelompok sasaran. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Siswari (2025) yang menunjukkan bahwa program bantuan ternak mampu meningkatkan pendapatan peternak dalam jangka pendek, tetapi keberlanjutan manfaat sangat bergantung pada dukungan pendampingan dan akses pasar. Selain itu, 'Ilma & Hasan (2022) menemukan bahwa efektivitas program bantuan ternak sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan pasca penyaluran, yang menentukan kemampuan peternak dalam mengoptimalkan bantuan yang diterima. Maka efektivitas kebijakan bantuan ternak di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan cukup efektif secara fungsional, namun masih bersifat parsial karena belum sepenuhnya menghasilkan *outcome* kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Efisiensi Kebijakan Program Bantuan Ternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efisiensi Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai berada pada kondisi yang relatif baik dari sisi pemanfaatan sumber daya, tetapi belum optimal dari sisi waktu dan proses. Secara umum, tidak ditemukan pemborosan sumber daya dalam bentuk tenaga maupun dana, karena bantuan ternak dimanfaatkan secara langsung sebagai aset ekonomi oleh peternak. Namun demikian, proses birokrasi dalam penyaluran bantuan dinilai cukup panjang karena harus melalui tahapan perencanaan, pendataan, verifikasi, hingga kesiapan sarana pendukung di lapangan. Selain itu, pendampingan dan monitoring pasca penyaluran masih terbatas, sehingga potensi ternak belum dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi program masih bersifat parsial, di mana efisiensi penggunaan sumber daya telah tercapai, tetapi efisiensi waktu dan manajerial belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara input dan outcome kebijakan, terutama pada aspek implementasi dan koordinasi.

Dalam perspektif William N. Dunn (2003) efisiensi kebijakan diukur berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh (dalam Azizah, 2022). Kebijakan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan manfaat maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal. Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai belum sepenuhnya mencapai efisiensi optimal karena masih terdapat jeda waktu yang panjang dan keterbatasan pendampingan yang memengaruhi hasil akhir program. Sejalan dengan penelitian Nasiu et al (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan koordinasi dan pendampingan dalam program bantuan ternak menyebabkan manfaat yang dihasilkan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan. Selain itu, (F. Surya et al., 2025) menegaskan bahwa efisiensi kebijakan sangat bergantung pada integrasi antara distribusi bantuan dan sistem pendukung, seperti layanan teknis

dan akses pasar. Efisiensi Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan cukup efisien secara administratif, tetapi belum optimal secara substantif karena masih terdapat kelemahan pada aspek waktu dan pendampingan.

Kecukupan Kebijakan Program Bantuan Ternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai telah mampu memenuhi kebutuhan awal peternak dalam bentuk penyediaan aset produktif. Bantuan ternak menjadi pemicu peningkatan aktivitas beternak dan memberikan peluang ekonomi bagi rumah tangga peternak. Namun demikian, jumlah bantuan yang diberikan masih dirasakan belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara optimal, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan pakan, obat-obatan, serta minimnya pendampingan lanjutan. Selain itu, kebutuhan sarana produksi dan dukungan teknis belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga peternak masih harus menanggung biaya tambahan yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu menjawab kebutuhan peternak secara utuh, khususnya dalam aspek keberlanjutan usaha. Kebijakan yang cukup adalah kebijakan yang tidak hanya memberikan solusi awal, tetapi mampu mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh. Dalam hal ini Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai masih berada pada tingkat kecukupan minimal karena hanya memenuhi sebagian kebutuhan peternak.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Siswari, 2025) yang menunjukkan bahwa bantuan ternak tanpa dukungan tambahan berupa pelatihan dan akses pasar tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Keterbatasan cakupan bantuan dan dukungan teknis menjadi faktor utama rendahnya tingkat kecukupan kebijakan. Tingkat kecukupan Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan belum memadai secara utuh, karena masih terbatas dalam menjawab kebutuhan riil peternak.

Pemerataan Kebijakan Program Bantuan Ternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan ternak di Kabupaten Banggai telah dilakukan berdasarkan kriteria administratif dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, pemerataan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Kelompok peternak yang aktif dan memiliki akses informasi yang baik cenderung lebih mudah memperoleh bantuan, sementara peternak kecil dan masyarakat di wilayah terpencil memiliki akses yang lebih terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan distribusi bantuan dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua kelompok peternak dapat terakomodasi dalam satu periode. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketimpangan di kalangan masyarakat, terutama bagi kelompok yang belum menerima bantuan. Pemerataan kebijakan tidak hanya diukur dari distribusi formal, tetapi dari sejauh mana manfaat kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran (Aziz et al., 2025). Kebijakan yang merata adalah kebijakan yang mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, bukan hanya kelompok yang paling siap secara administratif (Amelia, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian (A. Surya, 2013) yang menunjukkan bahwa distribusi bantuan ternak cenderung

lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki kapasitas kelembagaan lebih baik. Selain itu, Rahman et al. (2025) menegaskan bahwa keterbatasan akses informasi menjadi faktor penting dalam ketimpangan distribusi bantuan (Ananda, 2022). Pemerataan Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai masih bersifat prosedural, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Responsivitas Kebijakan Program Bantuan Ternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai memiliki tingkat responsivitas yang cukup, yang ditandai dengan adanya mekanisme pengaduan melalui pemerintah desa dan penyuluh lapangan. Peternak dapat menyampaikan keluhan terkait perawatan ternak, dan dalam beberapa kasus, petugas memberikan respons berupa arahan teknis atau kunjungan lapangan. Namun demikian, respons yang diberikan masih bersifat reaktif dan belum didukung oleh sistem pengaduan yang terstruktur. Intensitas pendampingan yang terbatas serta lambatnya tindak lanjut terhadap keluhan menjadi indikator bahwa responsivitas kebijakan belum optimal.

Responsivitas kebijakan diukur dari kemampuan pemerintah dalam mengenali dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat (Warawirin et al., 2025). Kebijakan yang responsif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan program bantuan ternak sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dan respons pemerintah terhadap kebutuhan peternak (S. M. Putri et al., 2025). Keterbatasan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat menyebabkan kebijakan kurang adaptif (Pratama et al., 2025). Responsivitas Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan cukup, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan sistem pengaduan.

Ketepatan Kebijakan Program Bantuan Ternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum jenis ternak yang diberikan telah sesuai dengan kondisi alam dan budaya beternak masyarakat di Kabupaten Banggai. Pembagian bantuan ke dalam kategori ayam super, kambing PE, dan sapi bali mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan potensi wilayah. Namun masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa aspek, seperti keterbatasan sarana pendukung, ketidaksesuaian dengan kondisi iklim, serta perbedaan kapasitas peternak dalam mengelola ternak. Selain itu, waktu pelaksanaan program belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor musim, yang memengaruhi keberhasilan usaha ternak. Ketepatan kebijakan merujuk pada kesesuaian antara kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sasaran (I.M et al., 2025). Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang relevan secara kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat. Temuan ini sejalan dengan (Ariansyah et al., 2025) yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kapasitas warga dapat menurunkan efektivitas program. Artinya sangat penting partisipasi masyarakat dalam menentukan jenis bantuan agar kebijakan lebih tepat sasaran. Ketepatan Program

Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan berbasis kebutuhan lokal.

Dampak Program Bantuan Ternak terhadap Peningkatan Kesejahteraan Peternak di Kabupaten Banggai ***Dampak Ekonomi***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai memberikan dampak ekonomi yang bersifat tidak seragam antar jenis ternak. Bantuan ayam super terbukti memberikan peningkatan pendapatan secara relatif cepat karena siklus produksi yang singkat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain yang tidak tetap. Sebaliknya, bantuan kambing PE dan sapi bali belum memberikan peningkatan pendapatan secara langsung dalam jangka pendek, tetapi berfungsi sebagai aset ekonomi jangka menengah dan panjang yang dapat dimanfaatkan sebagai tabungan hidup atau sumber dana darurat. Selain itu, peningkatan ekonomi juga tercermin dari bertambahnya jumlah ternak melalui reproduksi yang secara bertahap meningkatkan nilai aset keluarga peternak. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi program bantuan ternak bersifat dualistik, yaitu menghasilkan pendapatan langsung (*income generating*) pada ternak ayam super dan penguatan aset (*asset building*) pada ternak kambing dan sapi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang.

Dampak ekonomi kebijakan harus dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar memberikan manfaat sesaat (Handini et al., 2025). Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai telah menghasilkan output berupa peningkatan kepemilikan aset produktif, namun outcome ekonomi yang berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai karena masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga, biaya produksi, dan keterbatasan akses pasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Safitri et al., 2024) yang menunjukkan bahwa program bantuan ternak mampu meningkatkan pendapatan peternak dalam jangka pendek, tetapi keberlanjutan dampaknya sangat dipengaruhi oleh stabilitas pasar dan dukungan sistem pemasaran. Selain itu, (Hidayat et al., 2024) menemukan bahwa peningkatan dampak ekonomi program bantuan ternak berkorelasi dengan kualitas pendampingan dan kapasitas usaha peternak dalam mengelola ternak secara produktif. Dampak ekonomi Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan cukup signifikan pada tahap awal, tetapi belum sepenuhnya berkelanjutan dan merata pada seluruh kelompok sasaran.

Dampak Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai memberikan dampak sosial yang cukup positif terhadap kehidupan masyarakat. Bantuan ternak mendorong peningkatan interaksi sosial

antar peternak melalui kegiatan berbagi pengalaman, kerja sama dalam pemeliharaan ternak, serta partisipasi dalam kelompok peternak. Selain itu, kepemilikan ternak juga meningkatkan posisi sosial peternak di masyarakat, karena dianggap memiliki usaha produktif dan aset ekonomi yang jelas. Program ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi dalam kegiatan musyawarah dan program pembangunan desa.

Namun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa dampak sosial belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan. Beberapa kelompok ternak masih bersifat pasif dan hanya aktif pada saat penyaluran bantuan, tanpa menunjukkan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat potensi kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima bantuan yang dapat memengaruhi keharmonisan sosial di tingkat desa. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak sosial program masih berada pada tahap interaksi sosial awal, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi penguatan kelembagaan sosial yang struktural. Artinya, manfaat sosial yang dihasilkan masih bersifat situasional dan belum terinstitusionalisasi secara kuat.

Dampak sosial kebijakan tidak hanya diukur dari peningkatan interaksi, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu memperkuat struktur sosial, meningkatkan partisipasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Rois et al., 2026). Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai telah menghasilkan dampak sosial awal, tetapi belum sepenuhnya membangun kapasitas sosial kolektif yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan (Zaenuddin, 2026) yang menunjukkan bahwa penguatan dampak sosial program bantuan ternak sangat bergantung pada kualitas pendampingan kelompok dan fasilitasi kelembagaan. Selain itu, (Siswari, 2025) menemukan bahwa ketidakmerataan distribusi bantuan dapat memicu kecemburuan sosial yang berpotensi melemahkan ikatan sosial masyarakat. Dengan demikian, dampak sosial Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan cukup positif secara awal, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan agar mampu menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dampak Kesejahteraan Peternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan peternak, meskipun dengan karakteristik yang berbeda berdasarkan jenis ternak. Bantuan ayam super terbukti meningkatkan kesejahteraan dalam jangka pendek melalui tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi dan pendidikan. Sementara itu, bantuan kambing PE dan sapi bali lebih berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan jangka menengah dan panjang melalui penguatan aset ekonomi keluarga yang berfungsi sebagai cadangan ekonomi. Selain itu, kesejahteraan peternak juga meningkat dalam bentuk non-ekonomi, seperti adanya kepastian usaha, meningkatnya rasa aman ekonomi, serta tumbuhnya kemandirian dalam mengelola usaha ternak. Namun demikian, kesejahteraan yang diperoleh masih bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada

faktor eksternal seperti harga pasar, biaya produksi, serta keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan.

Temuan ini menunjukkan bahwa dampak kesejahteraan program bantuan ternak masih bersifat parsial dan belum stabil, karena belum sepenuhnya mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata. Kesejahteraan sebagai *outcome* kebijakan harus dipahami sebagai perubahan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan kapasitas kemandirian (Aziz et al., 2025). Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai telah berhasil meningkatkan kesejahteraan pada level tertentu, tetapi belum mencapai transformasi kesejahteraan yang struktural. Temuan ini sejalan dengan (Handini et al., 2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan peternak melalui program bantuan ternak sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan kebijakan dan akses terhadap pasar. Selain itu, (A. Surya, 2013) menegaskan bahwa kesejahteraan peternak tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan ternak, tetapi juga oleh kemampuan mengelola usaha secara produktif dan berkelanjutan. Dampak kesejahteraan Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan cukup meningkat, tetapi belum sepenuhnya stabil, merata, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Program Bantuan Ternak di Kabupaten Banggai secara umum telah mampu menghasilkan capaian awal yang positif, terutama dalam meningkatkan akses peternak terhadap aset produktif dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis peternakan. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan, program ini tergolong cukup efektif dan efisien secara administratif, serta memiliki tingkat ketepatan yang relatif baik dalam penyesuaian jenis ternak dengan kondisi lokal. Namun demikian, dari aspek kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, kebijakan masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal pendampingan berkelanjutan, distribusi yang belum sepenuhnya adil, serta mekanisme respons yang masih bersifat reaktif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan masih berorientasi pada pencapaian output berupa distribusi bantuan, tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan *outcome* yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh kelompok sasaran.

Lebih lanjut, dampak program terhadap kesejahteraan peternak menunjukkan pola yang bersifat multidimensional namun tidak seragam. Dampak ekonomi relatif signifikan pada ternak dengan siklus produksi cepat seperti ayam super, sementara ternak kambing dan sapi lebih berkontribusi pada penguatan aset ekonomi jangka panjang. Dampak sosial terlihat pada peningkatan interaksi dan partisipasi peternak, meskipun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk kelembagaan yang kuat. Secara keseluruhan, peningkatan kesejahteraan peternak masih bersifat parsial, fluktuatif, dan sangat bergantung pada faktor eksternal seperti akses pasar, biaya produksi, serta kualitas pendampingan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model integrasi kebijakan bantuan ternak dengan sistem pendampingan, penguatan akses pasar, serta pendekatan berbasis pemberdayaan yang lebih kontekstual, sehingga mampu

menghasilkan transformasi kesejahteraan peternak yang lebih berkelanjutan dan merata.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Ilma, A. N., & Hasan, D. B. N. (2022). Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Program Ternak Desa Sejahtera Laznas Nurul Hayat Gresik. *Jurnal Kaffa*, X(X), 1-15.
- Amelia, D. M. (2025). Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 15-23.
- Ananda, S. D. (2022). Mapping And Counseling On Inequality Of Access To Social Assistance Services In Babau. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1).
- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos Kepada Masyarakat Miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(May).
- Arikunto, S. (2011). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. In *Opac Perpustakaan Nasional Ri*. Rineka Cipta.
- Aziz, A., Akbar, A. Y., Daulay, J., & Ahmad, A. P. (2025). Dampak Kebijakan Pembangunan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1).
- Azizah, L. L. (2022). (Bos) Melalui Teori William Dunn (Studi Kasus Pada Sdn Lidah Kulon I / 464 Surabaya). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 48-57.
- Handini, N., Darwina, M., Yudistira, & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Kampus Akademik Publisng Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)*, 2(5), 964-986.
- Hasbiah, S., & Hasdiansa, I. W. (2025). Perancangan Model Bisnis Inovatif Untuk Optimalisasi Potensi Peternakan Di Desa Paconne ' Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Menggunakan Business Model Canvas (Bmc). *Journal Of Innovative And Creativity*, 5(3), 32462-32471.
- Herlamban, A. B., & Wicaksono, I. (2025). Evaluation Of Social Assistance Policy In Improving Community Welfare In Slawu Village, Jember Regency. *Jurnal Interelasi*, 1(4), 264-275.
- Hidayat, N. K., Rahila, A., & Raswatie, F. D. (2024). Analisis Ekonomi Dan Strategi Usaha Ternak Penerima Program 1000 Desa Sapi Potong (Studi Kasus : Kecamatan Ngadiluwih , Kabupaten Kediri , Provinsi Jawa Timur). *Indonesian Journal Of Agricultural, Resource And Environmental Economics*, 3(2), 59-75.
- I.M, S. F., Heryani, S., N.I.J, B. M., H, N. P., Firdaus, M. F., Sevtian, D., & Herdiana, D. (2025). Formulasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Penelitian. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50-55.
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Hasanah, Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron. (2024). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 7(1).

- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73.
- Mardiana, S. S., Shalshabilla, S., Rizkia, N., Mustari, P., Aura, Z., Putri, K. B., Kholishoh, S., Aini, I., & Nuryanto, Y. (2026). Implementasi Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(12).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*.
- Nasiu, F., Nafiu, L. O., Abadi, M., Auza, F. A., Asminaya, N. S., Agustina, D., Tasse, A. M., Yunus, L., Zani, M., Gandri, L., Manginsi, W. O. J., Kundarita, Setiawati, I. R., & Safitri. (2025). Farmers' Guidance On Strategy Strategy For Beef Cattle Feed Availability Through Focus Group Discussion With Stakeholders In Muna Regency. *Bakira: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 214–225.
- Nugroho, Y. A. (2018). *Perencanaan Pembangunan Subsektor Peternakan Dalam Perspektif Partisipatif (Studi Pada Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan Kabupaten Sleman)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Nunung, A., Latifah, Fatmawati, & Sulastri, L. (2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Untuk Menginvestigasi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 62–82.
- Nurhikma, E. A., Lazuardi, M. A., Sulistyati, M., & Yunasaf, U. (2026). Participatory Communication Approach In Empowering Livestock Farmers: Conceptual Review And Empirical Study. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 12(1), 115–120.
- Pratama, R. A., Pratama, H. O., Gustiana, I., Saputra, A., & Nasor, M. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Kepemerintahan Daerah. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 04(08), 120–130.
- Putri, I. M. Eka. (2025). *Kegagalan Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sapi Di Kabupaten Solok Selatan*. Universitas Andalas.
- Putri, S. M., Madarisa, F., & Basyar, B. (2025). The Role Of Extension Workers On The Function Of Beef Cattle Farmer Groups In Lima Puluh Kota Regency. *Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian*, 22(2), 111–127.
- Rizti, M., Kusmilawaty, & Fahdhila, T. I. (2025). Analisis Efektivitas Metode Turun Lapangan Dalam Menentukan Penerima Bansos Terhadap Distribusi Bansos. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 7(3), 6–8.
- Rois, N., Sari, A. R., Marihi, L. O., & Tuhumury, H. (2026). Edukasi Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23828–23839.

- Safitri, A., Ambarwati, I. T., Mukarramah, Rayyan, T., & Basriwijaya, K. M. Z. (2024). Analysis Of Determinants Success Of Local Buffalo Farming At Bptuhpt Siborong-Borong. *Agribusiness And Socioeconomic Journal Ase Journal*.
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., Syahril, & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503.
- Sinaga, I. L., & Rotua, B. (2024). Analysis Of Public Policy Implementation In Poverty Alleviation In Urban Areas. *Inspirasi & Strategi (Inspirat): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, 15(01), 10–17.
- Siswari. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Pemberian Bibit Kambing Betina Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sembongin Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. *Bookchapter Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 127–151.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Surya, A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Sektor Pertanian Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi*, 15(1).
- Surya, F., Fahmi, D., & Riofita, H. (2025). Kebijakan Ekonomi Publik Intervensi Pemerintah Terhadap Eksternalitas Dan Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2).
- Tumewu, J. M., & Lainawa, J. (2025). Manajemen Strategi Pemberdayaa Peternak Sapi Potong Di Kabupaten Minahasa. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian Uns*, 9(1), 285–297.
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan Ips*, 5(2), 610–621.
- Wakim, & Wibowo, A. (2025). From Field Insights To Digital Governance : A Mixed-Methods Dss For Enhancing Livestock Aid Distribution. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi (Jusi)*, 4(3), 257–268.
- Warawirin, R., Hada, M. R., Rehin, A. R., & Albertus, K. K. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik : Studi Kasus Prinsip Responsivitas. *Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntansi*, 2(2), 111–115.
- Warman, Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan General Concepts Policy Evaluation. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32.
- Zaenuddin. (2026). Inovasi Sosial Peternakan Rakyat Sebagai Implementasi Asta Cita Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Peternakan*, 4(1), 10–18. <https://doi.org/10.55080/Agronimal.V4i1.1911>
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Awang Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan). *Jurnal Japb*, 5, 256–271.